

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI PROVINSI MALUKU

Maryam Sangadji
Universitas Pattimura Ambon

Abstract

Poverty is a classic problem faced by all regions. Maluku province is very high sequence to four of 33 provinces in Indonesia. This study aims to: (1) Determine the influence of education on poverty in Maluku (2) To analyze the health effects on poverty in Maluku (3) Determine the effect of public investment on poverty in Maluku; and (4) To analyze the influence of economic growth on poverty in Maluku. Quantitative research using panel data regression model, the data collection process is primary or secondary.

The results showed that there were significant and negative influence of the variables Education, Public Investment and economic growth on poverty in Maluku province, while the health variable positive effect on poverty in the province of Maluku.

Keywords : Education, Health, Public Investment, Economic Growth, Poverty.

PENDAHULUAN

Salah satu aspek penting dari pembangunan ekonomi yang berkualitas adalah redistribusi hasil pembangunan ekonomi yang relatif merata antar lapisan masyarakat, sehingga output pembangunan ekonomi yang dicapai tidak hanya dinikmati oleh segelintir masyarakat. Karena itu, proses pembangunan ekonomi di setiap daerah memiliki tujuan akhir yang sama yaitu penciptaan tingkat kesejahteraan hidup (*standard of living*) yang tinggi dalam jangka panjang dengan indikator tingkat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat kemiskinan yang rendah dan distribusi pendapatan tidak timpang.

Fakta menunjukkan, prestasi kemajuan pembangunan ekonomi yang diukur dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang tinggi telah tercapai di Indonesia, namun

masalah kemiskinan masih merupakan fenomena yang sulit terpecahkan. Fenomena yang sama di Provinsi Maluku angka kemiskinan dengan ranking ke empat termiskin dari 33 Provinsi di Indonesia. Dan jika melihat dari pertumbuhan PDRB sebagai salah satu indikator kesejahteraan justru Maluku urutan ke dua paling rendah atau peringkat ke 32 dari 33 Provinsi di Indonesia yang paling tertinggi adalah DKI Jakarta (BPS Maluku, 2014). Kondisi ini juga terkonfirmasi melalui rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0 persen lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,8. Artinya kinerja pertumbuhan ekonomi tersebut masih dianggap rendah sejalan dengan tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi.

Berbagai slogan dan seruan anti kemiskinan di tanah air seringkali dikumandangkan di mana-mana tak terkecuali di provinsi yang dijuluki

“Seribu Pulau” ini, adalah merupakan bentuk refleksi dan aspirasi terhadap berbagai rentetan penderitaan masyarakat yang berawal dari krisis moneter, konflik sosial tahun 1999, kenaikan harga BBM dan sembilan bahan kebutuhan pokok sampai kepada berita meresahkan baik di media elektronik maupun media massa tentang meningkatnya angka-angka statistik berupa persentase jumlah penduduk miskin.

Provinsi Maluku terdiri dari 11 (sebelas) kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan yang sangat bervariasi. Kota Ambon merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan paling rendah di tahun 2013 sebesar 5,97% sedangkan delapan kabupaten kota lainnya rata-rata di atas 20%, Kabupaten Buru 19,76% dan kabupaten Buru Selatan sebesar 18,27%. Kabupaten Maluku Barat Daya dengan persentase tertinggi tingkat kemiskinan sebesar 35,52%. Walaupun terjadi penurunan kemiskinan sejak tahun 2009-2013 akan tetapi kondisi kemiskinan ini perlu diwaspadai, karena sebagian besar penduduk berada di bawah garis kemiskinan dan sebagian berada di sekitar garis kemiskinan, kemungkinan terjadi goncangan sosial, maka akan memperparah jumlah kemiskinan yang tersebar pada dua belas gugus pulau di Maluku.

Kondisi kemiskinan bersifat multidimensi. Pada kajian ini peneliti akan memfokuskan empat determinan atau empat faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu faktor pendidikan, kesehatan, pengeluaran publik dan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu studi yang kaji oleh Ranis dan Stewart (2000) bahwa pembangunan sumberdaya manusia merupakan salah satu strategi dalam penurunan angka kemiskinan. Kualitas

sumberdaya yang rendah akan menurunkan produktivitas sehingga upah juga akan rendah. Kemiskinan dipandang dari rendahnya derajat kesehatan menurut Kartasasmita dalam Jonaidi (2012) akan menentukan gizi seseorang dengan demikian jika miskin maka gizi juga rendah menyebabkan rendahnya ketahanan fisik, daya pikir dan prakarsa yang akan mempengaruhi produktivitas dan pendapatan. Untuk mengukur kemajuan pembangunan pendidikan di suatu wilayah adalah rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf sedangkan angka harapan hidup mencerminkan derajat kemajuan pembangunan kesehatan masyarakat. Ketiga indikator tersebut ditambah dengan komponen pengeluaran per kapita merupakan komponen-komponen yang membentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam penelitian komponen pengeluaran perkapita tidak di analisis dalam penelitian ini. Sebagian besar angka rata-rata kabupaten/kota sudah berada di atas angka rata-rata indikator Provinsi Maluku. Meski demikian, terdapat kecenderungan pembangunan pendidikan yang belum merata di seluruh wilayah. Selama tahun, 2009-2013, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah tertinggi dicapai oleh Kotamadya Ambon masing-masing sebesar 99,58 % untuk angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah 11,20 tahun. Capaian prestasi kemajuan pendidikan terendah terdapat di Kabupaten Buru Selatan dengan angka melek huruf sebesar 89,63 %, berarti sekitar 10,37% penduduk usia 15 tahun ke atas di wilayah tersebut masih mengalami buta huruf sejalan dengan tingkat pendidikan (rata-rata lama sekolah) yang juga masuk kategori terendah dibanding kabupaten/kota lainnya yaitu sebesar 7,46 tahun.

Ditinjau dari indikator kesehatan dan infrastruktur sosial, tampak bahwa kualitas kesehatan tertinggi dicapai oleh Kotamadya Ambon dengan perkiraan rata-rata lama hidup sebesar 73,01 tahun. Alokasi pengeluaran atau investasi publik juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, kondisi ini tentunya dapat menjelaskan, produktivitas akan meningkat, sehingga pembangunan juga akan meningkat dan pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku. Laju pertumbuhan investasi tertinggi pada tahun 2011 sebesar 28.66%. Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa investasi pemerintah atau pengeluaran di sektor publik sangat bermanfaat karena dapat mengurangi penduduk miskin seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Brata (2005), Chemingui (2007), Wahyudi dan Rejekingsih (2013).

Secara langsung investasi publik juga akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku yang menggambarkan potensi dari sembilan sektor yang ada ternyata pertumbuhan PDRB lebih banyak di suport oleh sektor pertanian dan sektor perdagangan. Sektor pertanian menjadi primadona namun sejak tahun 2012-2013 telah tergeser pada sektor perdagangan, hotel dan restoran (transformasi struktur ekonomi). Pada tahun 2013 kontribusi sektor perdagangan sebesar 29,26 persen di ikuti oleh sektor pertanian sebesar 28,22 persen dan kedua sektor ini juga menyerap tenaga kerja lebih tinggi, seharusnya penyumbang terbesar pada kedua sektor ini mampu mengurai tingkat kemiskinan penduduk di Maluku, karena secara teori telah terjadi transformasi struktur ekonomi, namun nampaknya walaupun terjadi penurunan

tingkat kemiskinan secara spasial pada 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku, akan tetapi kondisi kemiskinan masih sangat tinggi yang saat ini menduduki ranking ke empat dari 33 Provinsi di Indonesia (BPS Provinsi Maluku, 2014).

Fenomena perkembangan tingkat kemiskinan di Maluku menarik untuk dikaji lebih jauh. Adapun faktor-faktor yang dikemukakan sebelumnya perlu diuji secara empiris sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Maluku”

TINJAUAN PUSTAKA

Pendidikan: Rata-Rata Lama Sekolah dan Kemiskinan

Menurut Jeffrey Sachs di dalam bukunya “*The End of Proverty*” salah satu mekanisme dalam penuntasan kemiskinan ialah pengembangan *human capital* terutama pendidikan dan kesehatan (Sachs, 2005). Pendidikan akan memudahkan seseorang untuk menyerap teknologi modern sehingga dapat meningkatkan produktivitas yang bermanfaat bagi pembangunan (Ustama, 2009). Investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang diperlihatkan oleh meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Peningkatan pengetahuan dan keahlian akan mendorong peningkatan produktivitas kerja seseorang.

Tobing (dalam Hastarini, 2005), menjelaskan bahwa orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, diukur dengan lamanya waktu untuk sekolah akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibanding dengan

orang yang pendidikannya lebih rendah. Rata-rata lama sekolah, adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun (standar UNDP). Batas maksimum 15 tahun mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum yang ditargetkan adalah setara sekolah menengah atas (SMA). Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat mendorong peningkatan produktivitas seseorang, sehingga pendapatan juga akan meningkat, muaranya adalah kesejahteraan juga akan meningkat.

Kesehatan: Angka Harapan Hidup dan Kemiskinan

Angka harapan hidup (AHH) merupakan indikator dalam mengukur kesehatan seorang individu di suatu daerah. Angka harapan hidup adalah umur yang mungkin di capai seseorang sejak lahir pada tahun tertentu. Angka harapan hidup di hitung menggunakan pendekatan tak langsung. Ada dua jenis data yang digunakan dalam menghitung angka harapan hidup, yaitu anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup. Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum harapan hidup sesuai dengan standar UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas penghitungan. Indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun (standar UNDP). Negara-negara yang mempunyai tingkat kesehatan yang baik, setiap individunya memiliki rata-rata hidup lebih lama, sehingga secara ekonomis mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi

Investasi Publik

Menurut Adam Smith (1976) yang dikutip oleh Mangkoesebroto (1999: 1) pada dasarnya pemerintah sebuah negara mempunyai tiga fungsi pokok, sebagai berikut: (a) Memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan, (b) Menyelenggarakan peradilan, (c) Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta. Oleh karena itu, lingkup aktivitas pemerintah menjadi sangat terbatas, yaitu hanya pada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilakukan oleh pihak swasta. Dalam hal ini pemerintah mempunyai peranan dan wewenang untuk mengatur, memperbaiki atau mengarahkan aktivitas sektor swasta. Sektor swasta juga tidak dapat mengatasi masalah perekonomian secara global, sehingga perekonomian tidak mungkin dijalankan sepenuhnya sendiri.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur perestasi ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fisik. Beberapa perkembangan ekonomi fisik yang terjadi di suatu negara adalah penambahan produksi barang dan jasa, dan perkembangan insfrastruktur semua kebutuhan tersebut biasanya diukur dari perkembangan pendapatan rill yang dicapai suatu negara dalam periode tertentu

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup Provinsi Maluku yang secara administratif mencakup 11 kabupaten/kota yaitu 1) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), (2) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), (3) Kota Tual, (4) Kabupaten Maluku

Tengah (Malteng), (5) Kabupaten Buru, (6) Kabupaten Buru Selatan, (7) Kabupaten Kep. Aru, (8) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), (9) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), (10) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), (11) Kotamadya Ambon. Penelitian ini menggunakan data periode 2009-2013 dengan pertimbangan ketersediaan data 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Metode Analisis

Pendekatan analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan model regresi data panel. Data di olah dengan *softwareMS-Excell dan EViews 6.0*.

HASIL PENELITIAN

Estimasi Model Tingkat Kemiskinan Regional di Provinsi Maluku.

Metode estimasi panel data yang dipakai adalah menggunakan pendekatan *fixed effect model* (FEM), sesuai dengan perhitungan uji Chow dan uji Hausman dimana nilai probabilitas dari masing-masing uji < nilai $\alpha = 5\%$.

Periode waktu yang dianalisis dalam penelitian ini dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dan unit *cross section* adalah sebanyak 11 kabupaten/kota di Provinsi. Berdasarkan data yang di analisis menggunakan

panel data ini, dengan persamaan awalnya adalah:

$$POV_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LogAMH}_{it} + \beta_2 \text{LogAHH}_{it} + \beta_3 \text{LogGE}_{it} + \beta_4 \text{LogPDRB}_{it} + e_{it}$$

$i = 1, 2, \dots, 11$ (kabupaten dan kota di Provinsi Maluku)

$t = 2009, 2010, \dots, 2013$ (periode waktu analisis)

Regresi panel data menggunakan pendekatan *fixed effect* dalam penelitian ini mengasumsikan bahwa *intercept* diantara unit *cross section* (diantara kabupaten dan kota) bisa berbeda-beda, sementara *slope* atau koefisien regresi tidak berbeda diantara unit *cross section* dan selama periode analisis. Hasil estimasinya:

$$POV_{it} = 201,5220 - 2237464AMH_{it} + 7959929AHH_{it} - 6865454GE_{it} - 0,222352PDRB_{it} + e_{it}$$

Berdasarkan hasil regresi, dari nilai *effect* pada masing-masing unit *cross section* didapatkan persamaan untuk masing-masing kabupaten dan kota yang dianalisis. Persamaan tersebut memiliki koefisien regresi atau *slope* yang sama, sementara *intercept* berbeda-beda sesuai dengan besarnya *effect* pada masing-masing *cross section unit*.

Tabel 1. Persamaan Regresi Untuk Masing-Masing Unit *Cross Section* (Kabupaten/Kota)

No.	Cross Section	Effect	Equation
1	MTB	204,513484	$Y = 204,513484 - 2.237464AMH + 79.59929AHH - 686.5454GE - 0.222352PDRB + e$
2	MBD	200,016284	$Y = 200,016284 - 2.237464 AMH + 79.59929AHH - 686.5454GE - 0.222352PDRB + e$
3	MTGR	209,903520	$Y = 209,903520 - 2.237464AMH + 79.59929AHH - 686.5454GE - 0.222352PDRB + e$
4	KOTA TUAL	229,496160	$Y = 229,496160 - 2.237464AMH + 79.59929AHH - 686.5454GE - 0.222352PDRB + e$
5	KEP. ARU	206,202055	$Y = 206,202055 - 2.237464AMH + 79.59929AHH - 686.5454GE - 0.222352PDRB + e$
6	MTH	207,714009	$Y = 207,714009 - 2.237464AMH + 79.59929AHH - 686.5454GE - 0.222352PDRB + e$
7	SBB	199,728021	$Y = 199,728021 - 2.237464AMH + 79.59929AHH - 686.5454GE - 0.222352PDRB + e$
8	SBT	196,142187	$Y = 196,142187 - 2.237464AMH + 79.59929AHH - 686.5454GE - 0.222352PDRB + e$
9	BURU	184,622320	$Y = 184,622320 - 2.237464AMH + 79.59929AHH - 686.5454GE - 0.222352PDRB + e$
10	BURSE L	182,896890	$Y = 182,896890 - 2.237464AMH + 79.59929AHH - 686.5454GE - 0.222352PDRB + e$
11	AMBON	195,507077	$Y = 195,507077 - 2.237464AMH + 79.59929AHH - 686.5454GE - 0.222352PDRB + e$

Sumber: Hasil Pengolahan Data.

Dari hasil persamaan di atas nilai kemiskinan minimum yang ada pada kabupaten/kota bervariasi hal ini sangat beralasan mengingat jumlah kemiskinan pada masing-masing kabupaten kota juga berbeda. Seperti yang telah di kemukakan pada bab pendahuluan, bahwa persentase kemiskinan tertinggi terdapat pada kabupaten Maluku Barat Daya selama periode penelitian (2009-2013), namun jika melihat hasil persamaan dari nilai konstanta menggambarkan Kabupaten Maluku Barat Daya kemiskinan minimum yang terjadi setiap tahun (2009-2013) masih lebih rendah dibandingkan dengan Kota Tual yang memang kondisi kemiskinan pada kabupaten tersebut urutan ke enam. Hasil ini dapat dipahami dari dua sisi

yaitu: (1) rendahnya tingkat kemiskinan minimum karena, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Maluku Barat Daya juga sangat kecil dari 10 kabupaten/kota lainnya yaitu 0,4 persen; (2) Ada upaya yang serius dilakukan oleh pemerintah kabupaten Maluku Barat Daya, terbukti kemiskinan minimum yang dicapai oleh kabupaten ini relatif masih rendah, karena tingginya percepatan penanggulangan kemiskinan. misalnya kebijakan pemberdayaan masyarakat yang memang tidak diteliti dalam model penelitian ini.

Pengujian Hipotesis Dan Model

Pengujian model ini dilakukan untuk menguji hipotesis dan menguji ketepatan asumsi model.

Uji Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa variabel-variabel angka melek huruf (AMH), angka harapan hidup (AHH), investasi publik (GE) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan regional Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

Uji t-Statistik

Untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat, digunakan Uji t-Statistik dengan cara membandingkan nilai t-tabel dengan nilai t-hitung dari masing-masing variabel bebas. Nilai t-tabel untuk $df = 50$ ($df = n-k-1 = 55-4-1$) adalah $t_{0,05} = 1.67591$ atau -1.67591 . Nilai t-hitung dari masing-masing variabel bebas adalah -11.61603 untuk AMH, 2.242881 untuk AHH, -13.64537 untuk GE dan untuk PDRB sebesar -1.899956 dan probabilitas dari masing-masing variabel independen adalah sebesar 0.0000 , 0.0305 , 0.0000 dan 0.0647 .

Uji F-Statistik

Sedangkan untuk menguji variabel-variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat digunakan Uji F-Statistik dengan cara membandingkan nilai F-tabel dengan nilai F-hitung dari variabel-variabel bebas. Nilai F-tabel untuk $v_1 = df_1 = 4$ dan $v_2 = df_2 = 50$ adalah $F_{(0,05)}(4; 50) = 2,56$, sementara

nilai F-hitungnya adalah 108.5860 . Dengan demikian $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, H_0 ditolak, berarti variabel-variabel bebas (AMH, AHH, GE dan PDRB) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel terikat tingkat kemiskinan (POV).

Pengujian parameter yang signifikan baik secara parsial dan simultan tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas memenuhi kriteria uji statistik.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji model dengan menggunakan nilai koefisien determinasi (R^2) diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar $0,974362$. Hasil tersebut cukup besar dan nilai uji F tes artinya bahwa sebesar $97,4362$ persen tingkat kemiskinan regional yang terjadi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku periode 2009-2013 dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas sedangkan sisanya sebesar $2,5638$ persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdeteksi dalam model.

Faktor Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Maluku

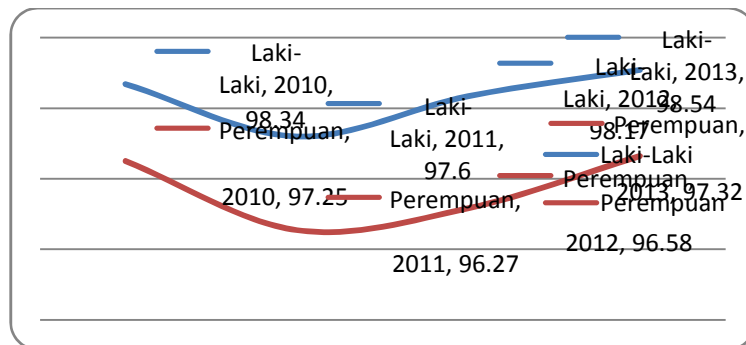
Dunia pendidikan di Maluku cukup baik, dilihat dari perkembangan angka melek huruf, maupun rata-rata lama sekolah walaupun pertumbuhannya sempat mengalami penurunan pada tahun 2011 dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2012 hingga tahun 2013.



Sumber : BPS Maluku, 2014.

Gambar 1. Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Maluku Tahun 2010-2013

Pengaruh Angka Melek Huruf Terhadap Kemiskinan



Sumber: Susenas, 2013. Data diolah

Gambar 2. Angka Melek Huruf di Provinsi Maluku, 2008-2013

Dari hasil statistik menggambarkan ada hubungan yang signifikan dan negatif antara tingkat melek huruf yang dialami di Provinsi Maluku yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar: 0,000 atau < dari 0,05, dengan nilai koefisiennya sebesar -2.237,464. menjelaskan bahwa ketika angka melek huruf tinggi dalam artian kemampuan membaca dan menulis tinggi atau naik sebesar 1 persen, maka kemiskinan akan berkurang sebesar 2.237 persen.

Angka Melek Huruf di tahun 2011 mengalami penurunan, hal ini karena masih ada sebagian penduduk dengan kantong-kantong buta huruf

masih tinggi seperti di Kabupaten Buru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Bursel dan Maluku Tengah. Masih tingginya angka buta huruf pada lima kabupaten di atas lebih banyak pada “*Suku Naulu*” yang belum tersentuh pada program-program penanggulangan buta huruf, selain itu juga pendatang yang tinggal pada wilayah-wilayah pesisir yang masih buta huruf. Fenomena ini seperti yang di tuturkan oleh Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku, Ibu Sin Manuputi di bawah ini:

Kabupaten Buru, SBB, SBT, Bursel dan Malteng angka buta huruf masih tinggi di tahun 2011, karena masih ada suku-suku terasing/Suku Naulu yang sebagian besar masih buta huruf, selain itu pendatang yang sebagian besar tinggal di wilayah pesisir masih buta huruf. Data ini kami peroleh dari PKBM-PKBM/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dari masing-masing kabupaten. Sehingga dari data PKBM-PKBM ini, akan mengusulkan berapa yang akan diberantas buta huruf di daerah tersebut. (wawancara, Februari, 2014)

Untuk menanggulangi buta huruf, masing-masing kabupaten kota membentuk PKBM atau pusat kegiatan Belajar Masyarakat. PKBM ini bertugas selain melakukan *assesment*/pendataan dan penggalian permasalahan buta huruf, tugas lainnya adalah melakukan berbagai program kegiatan belajar bagi masyarakat dalam bentuk dua fase penanganan yaitu: (a) Penanganan buta huruf tingkat dasar atau disebut dengan buta huruf murni, adalah penduduk yang belum mampu membaca, menulis dan berhitung, (b) Penanganan buta huruf untuk “mandiri”. Penanganan ini diperuntukan kepada penduduk yang telah ditangani pada tahap pertama dan akan ditingkatkan keberdayaan mereka melalui kegiatan keterampilan. Kegiatan keterampilan tersebut tujuannya adalah penguatan kapasitas ekonomi penduduk. Sehingga secara langsung program mandiri akan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan program penanganan buta huruf di atas, terbukti bahwa secara kuantitatif terjadi penurunan angka buta huruf di 11 kabupaten/kota teridentifikasi melalui AMH yang semakin meningkat atau kemampuan membaca, menulis yang semakin

merata. Dan hampir sebagian besar penduduk pada 11 kabupaten kota dengan nilai AMH rata-rata di atas nilai Provinsi. Pada tahun 2009 sebanyak dua kabupaten yaitu: Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Kabupaten Buru nilai AMH masih di bawah nilai provinsi. Dan Kabupaten Seram Bagian Timur semakin baik atau meningkat di tahun 2009-2013. (lihat tabel). Secara teoritis, angka melek huruf adalah 100 adalah batas maksimum yang harus di capai oleh sebuah daerah, dengan kata lain daerah telah terbebas dari buta huruf. Dengan demikian berdasarkan tabel 2, belum ada kabupaten/ kota di Maluku yang terbebas dari buta huruf.

Hasil penelitian, yang menggambarkan fenomena AMH pada setiap kabupaten kota, dan melihat hasil secara statistik ada hubungan yang signifikan dan negatif dari AMH terhadap penurunan kemiskinan dan sebaliknya, menegaskan bahwa, program-program pemerintah untuk memberantas buta huruf murni yang dilanjutkan dengan paket program mandiri, dapat mempengaruhi *sosial welfare*.

Paket program mandiri berupa pelatihan keterampilan sebagai sarana mengevaluasi kemampuan membaca, menulis dan berhitung dari penduduk yang telah di bina pada program dasar. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sin Manuputi di bawah ini:

Program pelatihan keterampilan seperti menjahit, secara langsung yang pertama teraplikasinya secara rutin membaca, menulis dan berhitung dari penduduk dan yang kedua secara langsung program keterampilan, menjadi ajang untuk mengevaluasi kemampuan dari penduduk yang telah di bina pada program dasar. Sehingga penduduk akan lebih mandiri secara ekonomi mereka akan lebih sejahtera, (wawancara, Maret, 2014)

Tabel 2. Angka Melek Huruf Kabupaten Kota di Provinsi Maluku tahun 2008-2013

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
Maluku Tenggara Barat	99,34	99,35	99,63	99,64	99,75
Maluku Barat Daya	97,93	98,12	98,13	98,25	98,25
Maluku Tenggara	99,52	99,54	99,54	99,58	99,58
Tual	99,68	99,7	99,7	99,71	99,71
Aru	98,8	99	99,05	99,06	99,07
Maluku Tengah	99,08	99,09	99,09	99,1	99,11
Seram Bagian Barat	98	98,22	98,28	98,29	98,3
Seram Bagian Timur	89,54	98,14	98,14	98,16	98,17
Buru	92,8	92,82	92,84	89,78	92,85
Buru Selatan	98,11	89,74	89,74	89,78	89,79
Ambon	99,19	99,2	99,59	99,61	99,62
Maluku	97,45	97,54	97,61	97,36	97,65

Sumber: BPS Provinsi Maluku, data diolah.

Mendasarkan pernyataan yang telah diungkapkan oleh ibu Sin Manuputi, mengandung arti bahwa semakin meningkatnya Angka Melek Huruf, karena ada program yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas buta huruf pada masing-masing kabupaten Kota. Hasil ini juga terkonfirmasi melalui belanja pendidikan khususnya bagi program pendidikan masyarakat adalah yang paling tertinggi sebesar 77 persen dan sisanya 23 persen untuk program penunjang (Laporan Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD, 2014)

Intervensi program selain pemerintah dalam mengatasi angka buta huruf ada juga *agent-agent* pembangunan lainnya, melalui misi keagamaan yang secara langsung turun di masyarakat misalnya di Maluku Barat Daya, Tual, Maluku Tenggara dan Aru, (Bapak Hadi/Sekretaris Dinas Pendidikan). Inti yang dapat di sampaikan pada analisis ini yaitu semakin banyak *agent* yang melayani, maka semakin tinggi penduduk yang teratasi masalah buta huruf, sehingga akan semakin banyak pula penduduk

yang produktif, dengan demikian akan semakin tinggi kesejahteraan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang telah di tulis oleh Junaidi 2012, bahwa angka melek huruf berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian (Widyasworo dan Radhity, 2014) bahwa pendidikan merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Dari hasil penelitian ini terlihat melalui program-program pendidikan non formal dapat mengurangi buta huruf, sehingga persentase angka kemiskinan semakin menurun. Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dikemukakan oleh Merna Kumalasari dan Dwisetia Poerwono, bahwa Angka Melek Huruf berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Hasil penelitian yang sama juga dari Hermanto dan Dwi bahwa pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan, namun hasil ini berbeda dilihat dari tingkat kepekaanya, menurut Hermanto dan Dwi Angka Melek Huruf pengaruhnya lebih tinggi dari PDRB, Invlasi dan Jumlah

penduduk, sedangkan hasil penelitian ini pengaruh yang lebih besar terhadap pengurangan tingkat kemiskinan adalah investasi publik atau pengeluaran pemerintah, bukan angka melek huruf. Angka Melek Huruf pengaruhnya urutan ke tiga dari tiga variabel bebas lainnya.

Pengaruh Angka Harapan Hidup (AHH) Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan nilai regresi diperoleh hasil bahwa koefisien Angka Harapan Hidup (AHH) bertanda positif dan signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan. Hasil ini bertentangan dengan teori, dimana peningkatan angka melek huruf, justru ditandai kemiskinan juga meningkat. Di negara-negara dengan tingkat kesehatan lebih baik, maka setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama, dengan demikian secara ekonomis mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi, dengan demikian kesejahteraan juga akan meningkat atau kemiskinan akan menurun. Lincoln (1999) menjelaskan intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin, kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output kerja.

Mengkaji hasil penelitian dari indikator kesehatan, ada pengaruh yang signifikan dari hasil penelitian terhadap kemiskinan, namun jika melihat nilai koefisien bertanda positif, ini mengindikasikan bahwa angka harapan hidup di Maluku yang tinggi rata-rata 67,40 persen pada tahun 2013, menandakan harapan hidup yang tinggi

belum tentu masyarakat sejahtera. Walaupun hampir sebagian besar kabupaten kota nilai AHH sudah di atas rata-rata nilai Provinsi. Kota Ambon merupakan nilai dengan angka Harapan hidup tertinggi dan paling terendah adalah Maluku Tenggara Barat dan MBD, dimana juga ada korelasi kedua kabupaten tersebut dengan kantong kemiskinan tertinggi.

Menurut standar UNDP angka harapan hidup maksimum adalah 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun, dengan demikian secara rata-rata untuk 11 kabupaten/kota di Maluku belum mencapai standar UNDP.

Berdasarkan hasil analisis, naiknya angka harapan hidup dalam lima tahun justru, tidak merubah tingkat kesejahteraan penduduk Maluku. Kondisi ini dapat di pahami dari tiga aspek yaitu: *pertama*, Angka harapan hidup yang semakin tinggi saat ini sudah di atas 65 tahun, secara teori usia produktif adalah umur 15-65 tahun, dengan demikian angka harapan hidup di atas umur produktif akan semakin berkurang produktivitasnya sehingga secara langsung berdampak pada pendapatan; *kedua*, bagi penduduk dengan AHH yang sudah di atas umur produktif, dan mereka yang tidak bekerja justru akan menjadi beban tanggungan keluarga. Dan saat ini angka beban tanggungan keluarga di tahun 2013 mencapai 4,00 persen pada struktur usia > dari 65 tahun sedangkan penduduk umur 15-64 tahun angka beban ketergantungan di tahun 2013 mencapai 60,00 persen, naik dari tahun 2012 hanya sebesar 59,81 persen.

Angka beban ketergantungan mengalami fluktuasi, dengan angka ketergantungan tertinggi ada pada tahun 2009, dalam artian bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus

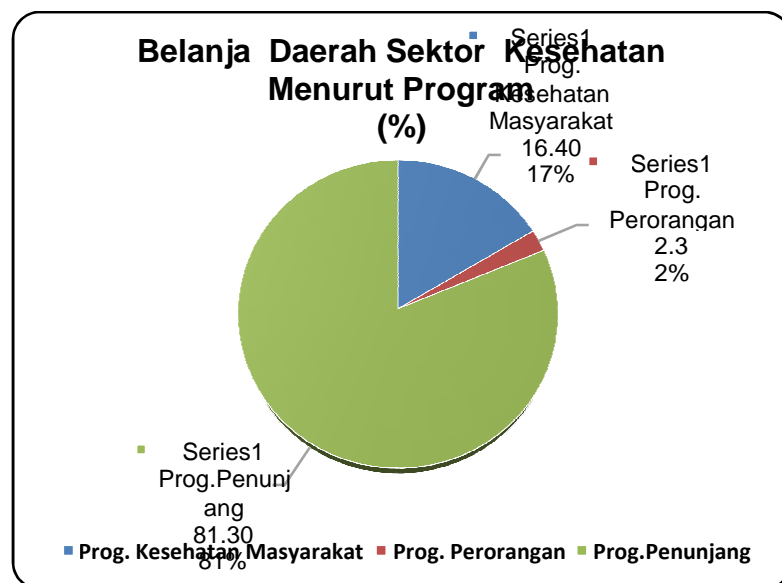
menanggung sekitar 71 orang penduduk usia tidak produktif.

Aspek ke *tiga* yaitu: program kesehatan belum pro terhadap masyarakat miskin. Anggaran kesehatan yang di luncurkan menurut mata anggaran lebih terfokus pada belanja operasional sementara belanja investasi sangat kecil. Dari seluruh kabupaten, rata-rata biaya operasionalnya 54,11% dan belanja investasi 44,29%. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran APBD masih terbatas pada pelayanan aparatur atau belanja pegawai dan belanja modal instansi, belum banyak mendapat perhatian pada investasi yang berdampak langsung pada kelompok masyarakat miskin. (Laporan SKPD, 2014).

Analisis di atas juga dapat diperkuat melalui distribusi mata anggaran kesehatan yang di luncurkan untuk program kesehatan ternyata dari tiga jenis program kesehatan yaitu: (1) Program Kesehatan Masyarakat; (2) Program Kesehatan Perorangan; dan (3) Program Penunjang (*Capacity*

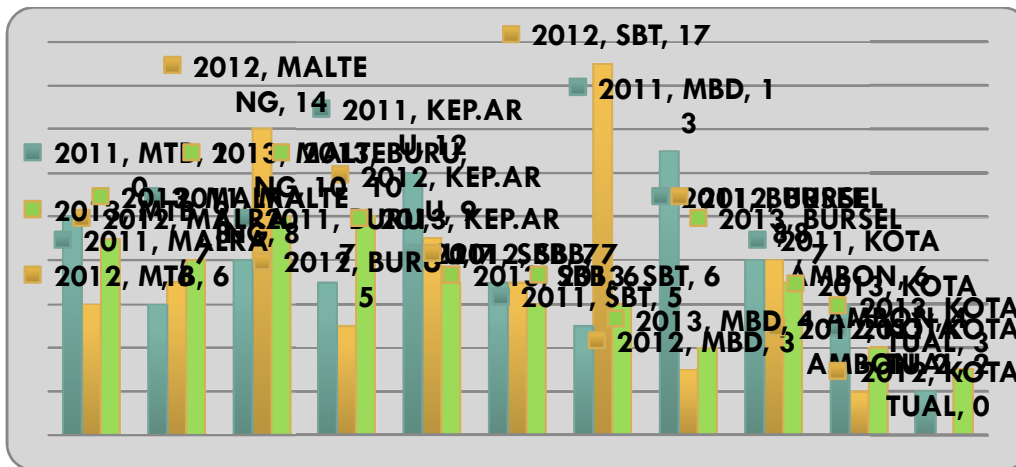
Building). Membuktikan anggaran program kesehatan masyarakat yang paling rendah (Laporan SKPD, 2014)

Masih rendahnya anggaran bagi program kesehatan masyarakat dengan rentang kendali yang sangat tinggi, disertai dengan masih kurangnya akses masyarakat terhadap pelayanan puskesmas atau rumah sakit membuat angka kematian ibu melahirkan juga sangat tinggi. Angka kematian ibu paling tertinggi di tahun 2012 adalah kabupaten Seram Bagian Timur dan Maluku Tengah. Kondisi ini ternyata berbanding terbalik dengan anggaran yang dialokasikan justru Maluku Tengah alokasi belanja kesehatan paling tinggi sebesar 28,71 persen, kondisi ini mencerminkan alokasi anggaran belum begitu efektif di Maluku Tengah. Sementara Kabupaten Seram Bagian Timur justru alokasi Anggaran terendah dari 10 kabupaten/kota di Maluku sebesar 4,05 persen ini masih wajar, ketika membicarakan program yang lebih berpihak kepada masyarakat miskin.



Sumber : Di sadur dari Kajian SKPD, 2014

Gambar 3. Belanja Daerah Sektor Kesehatan Berdasarkan Program



Sumber: Direktorat Bina Kesehatan Ibu, 2014.

Gambar 4. Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2011-2013
Tabel 3. Alokasi Belanja Sektor Kesehatan Tiap Kabupaten

Kab./Kota	Belanja Kesehatan (Rupiah)	Persentase (%)
Ambon	42.837.057.567	13,95
Maluku Tengah	88.157.043.284	28,71
Maluku Tenggara	34.903.250.920	11,37
Buru	28.453.269.519	9,27
Buru Selatan	20.581.098.838	6,70
SBB	42.496.195.668	13,84
SBT	12.443.198.026	4,05
Tual	19.567.352.223	6,37
Aru	17.589.704.624	5,73

Sumber : Hasil Kajian SKPD, Bapeda Provinsi Maluku, 2014

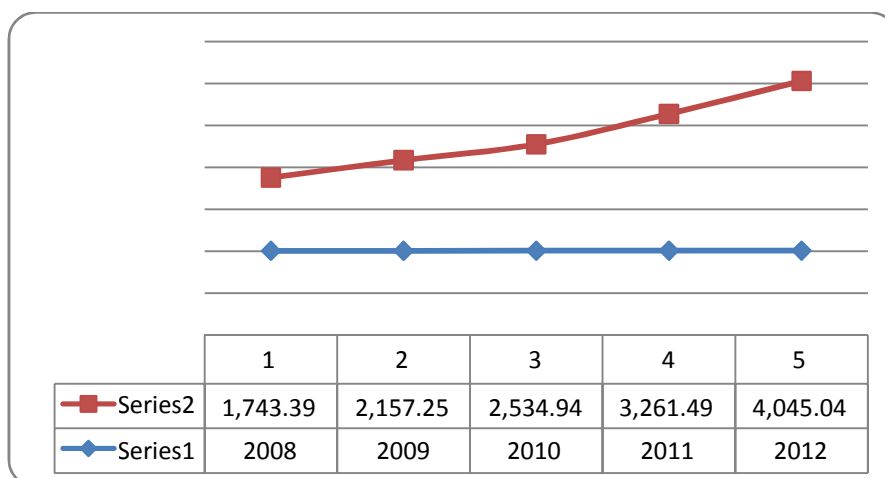
Berdasarkan data dan analisis di atas maka sangat beralasan bahwa AHH yang tinggi, relatif belum dapat berkorelasi negatif terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku.

Pengaruh Investasi Publik Terhadap Kemiskinan

Analisis regresi diperoleh hasil bahwa koefisien regresi dari investasi publik atau pengeluaran pemerintah sebesar -6,865.454 signifikan berpengaruh negatif secara statistik terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini berarti kenaikan pengeluaran pe-

merintah sebesar 1 rupiah akan mengurangi kemiskinan sebesar 6,865.454 persen. Dalam konteks ini pengeluaran pemerintah sangat efektif dalam pengurangan tingkat kemiskinan di Maluku atau lebih *pro poor*, dilihat dari peningkatan pengeluaran setiap tahunnya.

Untuk mengetahui investasi publik atau pengeluaran pemerintah terhadap penurunan kemiskinan seperti hasil regresi di atas, maka dapat di kaji seberapa besar anggaran pemerintah digunakan atau lebih berpihak atau pro masyarakat miskin.



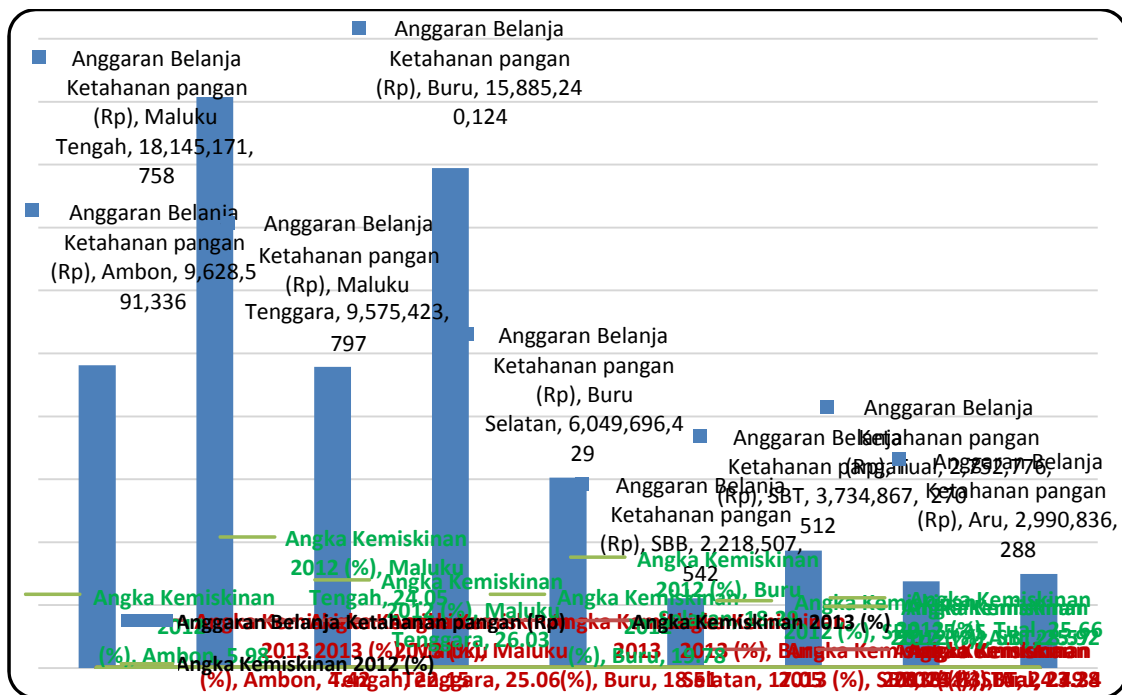
Sumber: BPS Maluku, 2013.

Gambar 5. Investasi Publik di Maluku Tahun 2008-2012

Berdasarkan laporan SKPD Provinsi (2014) alokasi anggaran terbesar terdapat pada sektor pendidikan sebesar 32,87 persen dari total belanja provinsi sebesar Rp 4,7 triliun (2013), 6,88 persen dari total anggaran di alokasikan untuk belanja sektor kesehatan, 10,84 persen belanja infrastruktur dasar, 1,50 persen belanja sektor pertanian dan ketahanan pangan, 0,54 persen belanja bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi sosial, sisanya untuk belanja selain sektor di atas (Laporan Satuan Kerja Perangkat Daerah, 2014).

Sedangkan belanja pemerintah pada sektor pertanian dan ketahanan pangan yang paling kecil, padahal penyerapan tenaga kerja tertinggi terdapat pada sektor ini dengan pendapatan terendah (Sangadji, 2013). Rendahnya nilai tambah sektor pertanian, disebabkan hampir sebagian besar penduduk menjual hasil pertanian dalam bentuk bahan baku, kurang di

proses menjadi bahan jadi. Untuk meningkatkan nilai tambah dari petani maka seharusnya belanja pada sektor pertanian dapat ditingkatkan, melalui intervensi pengembangan agroindustri sebab, bahan baku agroindustri adalah hasil pertanian (Sangadji, 2013). Berdasarkan pengeluaran pemerintah pada sektor ini pula terlihat bahwa pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi peranannya atau pengaruhnya dalam menurunkan angka kemiskinan di Maluku, dilihat dari nilai koefisiennya, ketimbang pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak sebanding dengan kontribusi sektor pertanian dan pangan yang selama ini masih menjadi penyumbang tertinggi dalam pembentukan PDRB. Sehingga akan sangat jelas ketika potensi pertanian dan pangan yang tinggi di Maluku namun alokasi anggarannya kecil ini akan berpotensi pada angka kemiskinan yang tinggi.



Sumber : Laporan Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD, 2014.

Gambar 6. Relevansi Anggaran Ketahanan Pangan Terhadap Tingkat Kemiskinan

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan

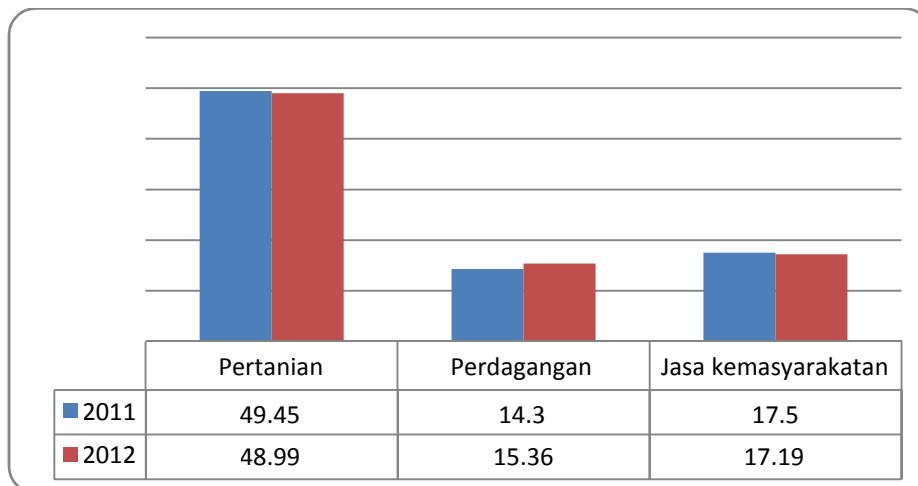
Hasil statistik menggambarkan ada hubungan yang signifikan antara tingkat pertumbuhan ekonomi yang dialami di Provinsi Maluku yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar: 0,0647 atau < dari 0,1 dengan nilai koefisiennya sebesar -0,222352, menjelaskan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1 rupiah, maka kemiskinan akan berkurang sebesar 0,222352 persen.

Kondisi ini dapat dipahami, mengingat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita yang meningkat, berarti penduduk miskin akan berkurang. Jadi, jelaslah bahwa pertumbuhan ekonomi baik untuk pengentasan kemiskinan, walaupun pengurangan kemiskinan dari pertumbuhan ekonomi

masih lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku sejak tahun 2008-2010 didominasi oleh sektor pertanian, namun di tahun 2011-2013 sudah terjadi pergeseran struktur ekonomi Maluku, yang saat ini sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pergeseran struktur ekonomi, dari sektor primer (pertanian) ke sektor tersier (perdagangan) namun saat ini kontribusi rata-rata dari sektor pertanian masih sangat tinggi yaitu sebesar 30,28 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 28,74 persen, kemudian disusul oleh sektor jasa-jasa sebesar 19,33 persen. Sektor-sektor tersebut sangat berperan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin, karena sangat mudah dimasuki oleh penduduk yang



Sumber: BPS Provinsi 2013. Data diolah

Gambar 7. Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja, Sektor Tahun 2011-2012 (%)

tergolong memiliki kemampuan dan pendidikan yang tergolong rendah. Hal lainnya adalah sektor-sektor tersebut tidak terlalu memerlukan keahlian yang khusus dan umumnya sektor-sektor tersebut tidak terlalu memerlukan *high technology*.

Rata-rata kontribusi dari sektor pertanian masih sangat tinggi dalam lima tahun terakhir, hal ini juga terlihat dari penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian yang tetap masih tinggi sebesar 49,45 persen pada tahun 2011 dan menurun menjadi 48,99 persen di tahun 2012. Penurunan jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian ini juga karena, terjadi pergeseran struktur ekonomi, dimana penduduk mulai melirik pekerjaan pada sektor perdagangan. Terlihat dengan jelas penyerapan tenaga kerja di tahun 2011 sebesar 14,30 persen naik di tahun 2012 menjadi 15,36 persen.

Meningkat pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan, seharusnya ada perhatian tinggi dari pemerintah dalam bentuk alokasi anggaran terhadap sektor-sektor yang potensial seperti pertanian sehingga di tingkat petani tidak hanya

menjual hasil pertanian dalam bentuk bahan baku saja namun ada peningkatan melalui diversifikasi usaha dalam bentuk pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi atau upaya pengembangan melalui agro-industri. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dinikmati oleh masyarakat karena ada peningkatan nilai tambah, jika tidak demikian potensi pertanian yang tinggi tidak bisa diserap oleh agroindustri, akan sulit mengatasi kemiskinan secara cepat. Apalagi sektor pertanian saat ini masih mendominasi struktur ekonomi Maluku. Dari hasil penelitian Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pattimura/LPKM (2014), bekerja sama dengan Bappeda Provinsi Maluku dilihat dari sebaran keunggulan dengan pendekatan *Location Quotion* (LQ) keunggulan sektor pertanian terdapat pada 9 (sembilan) kabupaten/kota (Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Buru, Buru Selatan, Aru, Tual, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya). Kota Ambon dan Maluku Tengah tidak unggul pada sektor pertanian, namun unggul pada sektor

lainnya. Itu berarti pemerintah sudah harus melakukan program berdasarkan potensi unggulan daerah, sehingga pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi, dengan nilai tambah yang lebih pro kepada penduduk miskin.

Adanya pengaruh yang signifikan dan negatif pertumbuhan ekonomi di Maluku terhadap penurunan angka kemiskinan, hasil tersebut sesuai teori dimana menurut Kuznets (Tulus Tambunan, 2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Pradeep Agrawal (2008) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa ketika terjadi pertumbuhan ekonomi, yang diikuti dengan peningkatan jumlah tenaga kerja dan tingginya upah riil, berpengaruh secara signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa telah terjadi pertumbuhan ekonomi dan terjadi peningkatan tenaga kerja, yang juga disertai dengan pergeseran struktur ekonomi di tahun 2011-2012, juga disertai dengan pergeseran tenaga kerja pada sektor tersier, penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian semakin menurun walaupun sektor primer (pertanian) masih tetap tinggi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Angka Melek Huruf, Investasi Publik dan Pertumbuhan

Ekonomi secara statistik berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Maluku.

A. Angka Melek Huruf

- a) Angka Melek Huruf pada 11 kabupaten/kota mengalami peningkatan setiap tahun (2009-2013)
- b) Angka Melek Huruf di kabupaten Kota sudah di atas rata-rata nilai Provinsi, hanya dua kabupaten yaitu Kabupaten Buru dan Buru Selatan yang masih di bawah nilai provinsi.
- c) Pemberantasan Buta Huruf, untuk meningkatkan Angka Melek Huruf di Kabupaten/Kota Provinsi dilakukan juga pendidikan luar sekolah melalui program penanganan buta huruf tingkat dasar dan penguatan melalui paket mandiri.

B. Investasi Publik

- a) Investasi publik atau pengeluaran pemerintah lebih besar pada sektor pendidikan sebesar 32,87 persen, tertinggi kedua pada belanja infrastruktur dasar sebesar 10,84 persen, dan terendah pada sektor pertanian dan ketahanan pangan yaitu sebesar 0,54 persen
- b) Persentase anggaran belanja pendidikan yang paling tertinggi adalah Kota Ambon sebesar 54,10 persen. Kondisi ini pula yang membuat Kota Ambon lebih unggul dari nilai Angka Melek huruf, rata-rata lama sekolah atau IPM-nya tertinggi ranking pertama
- c) Rendahnya alokasi belanja pemerintah pada sektor pertanian dan pangan, sementara potensi

unggulan ada pada sektor tersebut, dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi.

- d) Persentase Belanja pendidikan yang paling rendah yaitu Kabupaten Buru Selatan namun IPM-nya tidak yang paling rendah, IPM Kabupaten Buru Selatan rangking ke 9 (sembilan).

C. Pertumbuhan Ekonomi

- a) Pertumbuhan Ekonomi di Maluku di dominasi oleh 3 (tiga) sektor yaitu (1) pertanian, (2) perdagangan, hotel dan restoran, serta (3) jasa-jasa.
- b) Telah terjadi perubahan struktur ekonomi yang sebelumnya didominasi oleh sektor pertanian 2008-2011 dan untuk tahun 2012-2013 telah bergeser pada sektor perdagangan. Pergeseran ini juga menyebabkan perubahan penyerapan tenaga kerja meningkat pada sektor perdagangan, walaupun penyerapan tenaga kerja masih tinggi pada sektor pertanian.

2. Secara statistik Angka Harapan hidup berpengaruh signifikan dan bertanda positif terhadap kemiskinan di Provinsi Maluku.

SARAN

Mengingat Angka Melek Huruf, Investasi Publik dan Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan di Provinsi Maluku maka beberapa hal yang menjadi rekomendasi kebijakan yaitu:

1. Masih perlu upaya pemberantasan buta huruf pada 11 (sebelas) kabupaten kota sehingga, daerah

akan benar-benar terbebas dari buta huruf, sehingga AMH akan mencapai 100 persen, melalui *assesment* secara tepat

2. Kabupaten Buru dan Buru Selatan Angka Melek Huruf masih di bawah nilai Provinsi, diharapkan dapat meningkatkan program belajar di masyarakat dengan mengoptimalkan peran dari UPTD yang ada
3. Perlu adanya peningkatan anggaran di sektor pertanian dan pangan mengingat sektor ini merupakan sektor unggulan pada kabupaten/kota dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi, sehingga kemiskinan akan lebih cepat ditanggulangi
4. Angka harapan hidup yang tinggi namun tidak disertai dengan menurunnya kemiskinan, maka diharapkan adanya program-program pemerintah yang lebih pro kepada masyarakat, penduduk akan lebih produktif, sehingga harapan hidup yang tinggi tidak akan menjadi beban bagi pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : Penerbit STIE YKPN.
- Atmanti, Hastarini Dwi. 2005. Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan. *Jurnal Dinamika pembangunan* Vol. 2. No. 1. Hlm 30-39.
- Baltagi, Badi H. 2005. *Econometric Analysis of Panel Data*. Third Edition. Chichester : John Wiley & Sons Ltd.
- BPS, 2012. Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2011. *Berita Resmi Statistik No. 47/IX/1 September 2011*.

- Didownload Dari
<http://www.bps.go.id>.
Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku,
2014.
- Jonaidi, Arius. 2012. Analisis
Pertumbuhan Ekonomi dan
Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal
Kajian Ekonomi*. Vol. 1 No. 1,
April.: pp.140-164.
- Laporan SKPD, Bapedda Provinsi
Maluku, 2014
- The End of Poverty*. New
York:Penguin Press.
- Ustama, Dicky Djatnika. 2009. Peranan
Pendidikan Dalam Pengentasan
Kemiskinan. *DialogueJurnal
Ilmu Administrasi Dan
Kebijakan Publik*. Vol. 6, No.
1.pp 1-12.
- Wahyudi, Dicky dan Tri Wahyu
Rejekingsih. 2013. Analisis
Kemiskinan di Jawa Tengah.
*Diponegoro Journal of
Economics*. Vol. 2. No. 1. Hlm
1.
- Widyasworo, Radhitya. 2014. Analisis
Pengaruh Pendidikan,
Kesehatan, Dan Angkatan
Kerja Wanita Terhadap
Kemiskinan Di Kabupaten
Gresik (Studi Kasus Tahun
2008 – 2012). *Draft Jurnal
Ilmiah*. Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Brawijaya,
Malang.